

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kemiskinan merupakan masalah lama yang pada umumnya dihadapi hampir disemua negara-negara berkembang terutama negara yang padat penduduknya seperti Indonesia. Kemiskinan seharusnya menjadi masalah bersama yang harus ditanggulangi secara serius, kemiskinan bukanlah masalah pribadi golongan bahkan pemerintah saja, akan tetapi hal ini merupakan masalah setiap kita warga negara Indonesia. Kepedulian dan kesadaran antar sesama warga diharapkan dapat membantu menekan tingkat kemiskinan di Indonesia. Data jumlah penduduk dibawah garis kemiskinan menunjukkan angkayang semakin tinggi.

Hamid (2008) menyebutkan bahwa saat ini pengertian kemiskinan bukan hanya didasarkan pada aspek pendapatan dan konsumsi saja, namun mencakup aspek ketergantungan, harga diri, pendapatan, kesejahteraan dan sebagainya. Menurut SMERU melihat Research Institute, kemiskinan didefinisikan dengan melihat berbagai dimensi yaitu (Hamid, 2008):

1. Ketidakmampuan dalam mencukupi kebutuhan pokok (sandang pangan dan papan).
2. Tidak mempunyai akses terhadap kebutuhan dasar lainnya seperti kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih, dan transportasi.

3. Tidak mempunyai jaminan atas masa depan yang disebabkan tidak adanya investasi pendidikan dan keluarga.
4. Rentan terhadap masalah yang bersifat individual maupun missal
5. Mempunyai kualitas sumber daya manusia yang rendah dan sumber daya alam yang terbatas.
6. Tidak pernah ikut dalam kegiatan sosial di masyarakat
7. Tidak mempunyai akses terhadap kesempatan kerja dan pekerjaan yang mapan
8. Tidak mampu berusaha karena mempunyai kelainan fisik maupun mental

Ketidakmampuan sosial seperti anak-anak terlantar, wanita korban kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok minoritas dan terpencil.

Sejak terjadinya krisis multi dimensional yang melanda Indonesia 1997 yang ditandai dengan turunnya Presiden Soeharto, jumlah penduduk miskin melonjak tajam. Bantuan IMF turun pada Oktober 1997 dalam bentuk pinjaman uang terbukti belum bisa segera memperbaiki Stabilitas ekonomi yang akhirnya menjadi krisis yang semakin lama berkembang menjadi krisis yang berkepanjangan Krisis yang berkepanjangan itu semata-mata bukan karena masalah ekonomi global sajatapi juga karena kegagalan dalam mengelola pembangunan. Dimana kebijakan pembangunan lebih mementingkan aspek pertumbuhan daripada aspek pemerataan. Sebagai contoh,

pembangunan secara terus menerus hanya dilakukan dikawasan Pulau Jawa dan Bali sedangkan masih banyak daerah terpencil di Indonesia bagian timur yang masih diabaikan.

Berbagai program dan kebijakan yang telah dibuat pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan seperti Inpres Desa Tertinggal (IDT), Penanggulangan dalam mengatasi dampak krisis ekonomi, Beras Miskin (Raskin), Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan sebagainya sampai saat ini belum mampu mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia. Semua terjadi disebabkan karena program hanya menitik beratkan pada salah satu dimensi dari gejala kemiskinan seperti politik, ekonomi, sosial yang tidak menyentuh sampai akar penyebab kemiskinan, misalnya Bantuan Langsung Tunai (BLT), tetapi kurang efektif karena banyak yang salah sasaran, bahkan membuka peluang penyalahgunaan dana hingga berakibat konflik sosial di beberapa wilayah.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235) Secara umum menjelaskan bahwa tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemudian Pemerintah telah menetapkan

arah kebijakan fiskal tahun 2011 yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan rakyat dengan tetap melanjutkan kebijakan pro growth, pro job dan pro poor. Dengan demikian tersirat bahwa prioritas peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat miskin menjadi salah satu program nasional, artinya tingkat kemiskinan diharapkan terus mengalami penurunan.

Target pencapaian program penanggulangan kemiskinan dapat diukur berdasarkan skala waktu yaitu target jangka pendek, jangka menengah serta jangka panjang baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Target jangka pendek mengacu pada RKPD yang ditetapkan setiap tahun. Sedangkan target jangka menengah mengacu pada perencanaan lima tahunan yang ditetapkan dalam RPJM Nasional serta RPJM Daerah. Target jangka panjang mengacu pada perencanaan pembangunan 25 tahunan yang ditetapkan dalam RPJP Nasional dan daerah. artinya penanganan persoalan kemiskinan sudah menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah.

Program pengentasan kemiskinan daerah sebagai salah satu indikator penting kinerja pemerintah daerah di era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diharapkan menjadi pintu untuk mengatasi masalah ini. Sehingga perlu untuk menelaah kinerja pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan.

Berdasarkan uraian diatas maka dipandang perlu untuk menjabarkan data kemiskinan di kabupaten pinrang sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Kemiskinan Di Kabupaten Pinrang

Kategori	Kategori Kemiskinan				
Kemiskinan	2017	2018	2019	2020	2021
Garis Kemiskinan	256.055	280.746	294.349	338.731	345.892
Persentase Penduduk Miskin (PO)	8.46	8.81	8.46	8.86	8.81
Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1)	1.62	1.16	1.54	1.27	1.77
Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2)	0.44	0.26	0.40	0.34	0.50

Sumber: BPS Pinrang 2024 (Data diolah)

Dalam catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pinrang, garis kemiskinan dari tahun 2017 – 2021 mengalami peningkatan. Menelaah data tersebut, pemerintah dalam hal ini tidak mampu menekan atau meminimalisasi garis kemiskinan. Berdasarkan latar belakang yang ditemukan oleh peneliti memutuskan untuk mengangkat judul "Analisis pro poor dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kabupaten Pinrang

B. Rumusan Masalah

Bagaimana *pro poor* dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui *pro poor* dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kabupaten Pinrang

D. Manfaat

1. Manfaat Ilmiah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi kajian tentang Pro Poor di Kabupaten Pinrang

2. Manfaat Praktis

Hasil dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

1. Pengertian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Mamesh dalam Halim (2004), APBD adalah rencana operasional keuangan pemerintah daerah di mana di satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu dan di pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran dimaksud.

Menurut Badrudin (2012), APBD adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuanuang dan disetujui oleh DPRD dalam peraturan perundangan yang disebut Peraturan Daerah.

Menurut Mardiasmo (2012), APBD merupakan instrument kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Lanjutnya, anggaran daerah juga digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusandanperencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di

masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar evaluasi kinerja, alatbantu bagi untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semuaaktivitas dari berbagai unit kerja.

Menurut Mardiasmo (2018), APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD mencerminkan seluruh pendapatan dan belanja daerah selama satu tahun anggaran, yang terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Menurut Halid dan Simanjuntak (2019), APBD adalah instrumen utama kebijakan fiskal di tingkat daerah yang digunakan untuk mengalokasikan sumber daya publik dan menjalankan fungsi pemerintah daerah. APBD mencakup semua sumber pendapatan yang diharapkan diterima oleh pemerintah daerah dan semua jenis belanja yang direncanakan, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah.

Mahmudi (2020): Mahmudi mengartikan APBD sebagai rencana kerja pemerintah daerah yang berisi program-program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, disertai dengan estimasi pendapatan dan alokasi belanja. APBD berfungsi sebagai alat manajemen keuangan yang membantu dalam

pengambilan keputusan, pengendalian, dan evaluasi kinerja pemerintah daerah.

Setiawan (2022): Setiawan menjelaskan bahwa APBD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan untuk membiayai program dan kegiatan yang telah direncanakan, guna mencapai tujuan pembangunan daerah dan pelayanan publik yang efektif dan efisien.

Dewi dan Kusumastuti (2023): Menurut Dewi dan Kusumastuti, APBD adalah rencana kerja keuangan tahunan pemerintah daerah yang mencerminkan kebijakan publik dan prioritas pembangunan, serta menjadi dasar untuk pengelolaan pendapatan dan belanja daerah. APBD juga berfungsi sebagai alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan anggaran dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Menurut UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dari berbagai pengertian tentang APBD di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa APBD memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Rencana kegiatan suatu daerah beserta uraiannya secara rinci.
- b. Adanya sumber penerimaan untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas-aktivitas pemerintahan dan

adanya biaya–biaya yang merupakan batas minimal pengeluaran–pengeluaran yang akan dilaksanakan.

- c. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.
- d. Periode anggaran, yaitu biasanya satu tahun.

2. Tujuan Penyusunan Anggaran

Tujuan proses penyusunan menurut Mardiasmo (2002), yaitu:

- a. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiscal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintahan.
- b. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemerintahan.
- c. Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja.
- d. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR / DPRD dan masyarakat luas.

Menurut Mardiasmo (2002), paradigma anggaran daerah yang diperlukan di era otonomi daerah adalah sebagai berikut :

- a. Anggaran daerah harus bertumpu pada kepentingan publik.
- b. Anggaran daerah harus dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah (work better and cost less).
- c. Anggaran daerah harus mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran.

- d. Anggaran daerah harus dikelola dengan pendekatan kinerja (*performance oriented*) untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan.
 - e. Anggaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi terkait.
 - f. Anggaran daerah harus dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaan dananya dengan memperhatikan prinsip value for money.
3. Fungsi-fungsi APBD (Rinusu: 2006), yaitu:
- a. Fungsi kebijaksanaan fiskal: fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi.
 - b. Fungsi Manajemen: saat pedoman kerja atau arah kebijakan, sebagai alat kontrol masyarakat, dan sebagai alat ukur kinerja pemerintah.
4. Dasar Hukum Penyusunan Anggaran
- Paradigma baru anggaran menuntut adanya transparansi, dan akuntabilitas anggaran. Sistem anggaran yang mampu mencakup hal tersebut adalah permormanced budgeting yang penggunaannya dipayungi oleh:
- a. UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
 - b. PP nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

- c. Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
- d. Permendagri nomor 26 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2007,
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan
- f. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD).

5. Analisis Rasio Keuangan APBD

Brown (1993) menyarankan supaya menggunakan analisis rasio keuangan untuk menilai kondisi pemerintah daerah. Analisis Keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya (Halim, 2007).

Adapun pihak – pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pada APBD ini adalah:

- a. DPRD sebagai wakil dari pemilik daerah (masyarakat).
- b. Pihak eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya.

- c. Pemerintah pusat/ provinsi sebagai bahan masukan dalam pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi.

6. Anggaran Untuk Rakyat (*Pro Poor Budgeting*) Dan Indikatornya

Menurut Mardiasmo (2002), konsekuensi logis pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU nomor 22 tahun 1999 dan UU nomor 25 tahun 1999 menyebabkan perubahan dalam manajemen keuangan daerah. Perubahan tersebut antara lain adalah perlunya dilakukan *budgeting reform* atau reformasi anggaran. Reformasi anggaran meliputi proses penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban anggaran.

Aspek utama *budgeting reform* adalah perubahan dari *traditional budget* ke *performance budget*. Reformasi sektor publik yang salah satunya ditandai dengan munculnya era *new publicmanagement* telah mendorong usaha untuk mengembangkan pendekatan yang lebih sistematis dalam perencanaan anggaran sektor publik.

Pendekatan baru dalam sistem anggaran publik tersebut cenderung memiliki karakteristik umum. Menurut Mardiasmo (2002), karakteristik tersebut adalah sebagai berikut:

(a). komprehensif/komparatif, (b). terintegrasi dan lintas departemen, (c). proses pengambilan keputusan yang rasional, (d). berjangka panjang, (e). spesifikasi tujuan dan perangkingan prioritas, (f). analisis total *cost* dan *benefit* (termasuk *opportunity cost*), (g). berorientasi input, output dan outcome (*value for money*), bukan sekedar input, dan (h). adanya pengawasan kinerja.

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa dengan adanya reformasi sektor publik diharapkan sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut harus mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik artinya harus berorientasi pada kepentingan publik. Merupakan kebutuhan masyarakat daerah untuk menyelenggarakan otonomi secara luas, nyata dan bertanggung jawab dan otonomi daerah harus dipahami sebagai hak atau kewenangan masyarakat daerah untuk mengelola dan mengatur urusannya sendiri.

Anggaran yang berpihak kepada rakyat miskin dapat diterjemahkan sebagai Praktek perencanaan dan penganggaran yang sengaja ditujukan untuk membuat kebijakan, program dan

kegiatan yang dampaknya dapat meningkatkan kesejahteraan atau terpenuhinya kebutuhan hak-hak dasar masyarakat. (Rinusu, 2006)

Menurut Bapenas (2008), *Pro-Poor Planning And Budgeting* (P3B) atau perencanaan dan penganggaran kemungkinan besar bersifat "*pro poor*" jika:

- a. Orang miskin ditargetkan untuk mendapat perhatian khusus, sehingga proporsi orang miskin yang menerima manfaat lebih besar dari proporsi orang miskin dalam populasi.
- b. Perencanaan dan penganggaran difokuskan pada akar masalah dari kemiskinan, serta memberikan kemampuan pada orang miskin agar dapat mengakses dan menggunakan sumber daya yang dapat membantu mereka untuk keluar dari kemiskinan.
- c. Perencanaan dan penganggaran yang dapat memaksimalkan manfaat bagi orang miskin melalui program yang dihubungkan dengan *MDG's*.
- d. Orang miskin dapat berpartisipasi dalam perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi atas langkah-langkah penanggulangan kemiskinan

Selanjutnya menurut Bapenas (2008), untuk menyiapkan suatu rencana dan anggaran yang "*pro poor*", maka dibutuhkan beberapa langkah:

- a. Seluruh pemangku kepentingan, tidak hanya pemerintah, sebaiknya memahami dan menyetujui identifikasi akar masalah

- kemiskinan dan kebutuhan utama orang miskin dengan menggunakan data kemiskinan BPS, pemetaan kemiskinan, pengukuran tingkat pencapaian *MDGs*, pengetahuan lokal, dan lain-lain.
- b. Menentukan prioritas utama— tidak 20 atau 25 tetapi 10 atau 12 - untuk rencana aksi “*pro-poor*” untuk kurun waktu 3 sampai 5 tahun, yang dapat memenuhi kebutuhan utama orang miskin sebagaimana telah diidentifikasi pada langkah di atas.
 - c. Menilai tingkat keberpihakan anggaran saat ini apakah sudah berpihak pada kaum miskin atau belum, dengan misalnya melakukan identifikasi sejauh mana kesenjangan *MDGs* untuk pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan sudah ditanggulangi dan dibiayai. Contoh lain, sejauh mana program pengembangan ekonomi saat ini sudah difokuskan pada industri yang mempekerjakan banyak orang miskin seperti usaha mikro dan kecil serta usaha pertanian.

Nilai Lebih *Pro-poor Budgeting (PpB)* menurut Rinusu (2006) adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi kesejahteraan sosial masyarakat (*social welfare function*) menjadi lebih optimal.
- b. Mempercepat proses demokratisasi. Melalui mekanisme proses perencanaan dan penganggaran yang partisipatif, misalnya,

- memberikan ruang bagi kaum miskin untuk mengaktualisasikan hak-hak politiknya terhadap kebijakan anggaran publik.
- c. Faktor pendorong terciptanya stabilisasi politik dan sosial, karena kepentingan kaum miskin yang selama ini cenderung tertinggalkan sehingga mengakibatkan frustrasi yang berkepanjangan, sekarang aspirasi mereka mendapatkan saluran yang semestinya.
 - d. Mempercepat proses penanggulangan kemiskinan. Dengan menerapkan *PpB*, upaya penanggulangan kemiskinan menjadi lebih fokus dan transparan. Kebutuhan-kebutuhan sosial dasar kaum miskin seperti sarana kesehatan, pendidikan dan pengembangan usaha-usaha produktif menjadi lebih mudah terpenuhi.
 - e. Meningkatkan pendapatan bagi kelompok miskin. Meskipun *PpB* tidak dapat menuntaskan dimensi kemiskinan secara menyeluruh, minimal ia dapat menjadi media yang membuka peluang kaum miskin untuk meningkatkan pendapatannya. Jika aspek ini saja dapat tercapai maka implikasinya terhadap pengurangan kesenjangan distribusi pendapatan menjadi sangat berarti.
 - f. Meningkatkan produktivitas atau kapasitas ekonomi, nasional maupun regional. Sebagai entitas ekonomi, kegiatan ekonomi kaum miskin yang terus berkembang tentunya akan memberikan

kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan produktivitas ekonomi”.

Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK: 2005), mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Definisi kemiskinan ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa masyarakat miskin, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya.

7. Definisi Kemiskinan

Menurut Bank Dunia, kemiskinan merupakan kekurangan dalam kesejahteraan, yang terdiri dari banyak dimensi. Badan Pusat Statistik mendefinisikan kemiskinan sebagai individu yang mempunyai rata-rata pengeluaran per bulan kurang dari garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah penjumlahan antara garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan nonmakanan. Garis kemiskinan makanan adalah garis kemiskinan yang mengacu pada pengeluaran individu dalam memenuhi kebutuhan minimum makanannya sebanyak 2.100 kalori per kapita per hari, sedangkan garis kemiskinan nonmakanan mengacu pada pengeluaran individu dalam memenuhi kebutuhan minimum nonmakanan, seperti perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan (Hakim, 2006).

Hamid (2008) menyebutkan bahwa saat ini pengertian kemiskinan bukan hanya didasarkan pada aspek pendapatan dan konsumsi saja, namun mencakup aspek ketergantungan, harga diri, pendapatan, kesejahteraan dan sebagainya. Menurut SMERU melihat Research Institute, kemiskinan didefinisikan dengan melihat berbagai dimensi yaitu (Hamid, 2008):

- a. Ketidakmampuan dalam mencukupi kebutuhan pokok (sandang pangan dan papan).
- b. Tidak mempunyai akses terhadap kebutuhan dasar lainnya seperti kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih, dan transportasi.
- c. Tidak mempunyai jaminan atas masa depan yang disebabkan tidak adanya investasi pendidikan dan keluarga.
- d. Rentan terhadap masalah yang bersifat individual maupun massal
- e. Mempunyai kualitas sumber daya manusia yang rendah dan sumber daya alam yang terbatas.
- f. Tidak pernah ikut dalam kegiatan sosial di masyarakat
- g. Tidak mempunyai akses terhadap kesempatan kerja dan pekerjaan yang mapan
- h. Tidak mampu berusaha karena mempunyai kelainan fisik maupun mental

- i. Ketidakmampuan sosial seperti anak-anak terlantar, wanita korban kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok minoritas dan terpencil.

Berdasarkan definisi-definisi disimpulkan bahwa kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu mencukupi kebutuhan dasarnya. Menurut BPS, kemiskinan pada dasarnya bisa dilihat dari dua sisi, yaitu:

- a. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang berkaitan dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan yang terbatas pada kebutuhan pokok sehingga orang tersebut dapat disebut hidup dengan layak. Kemiskinan absolut diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan seseorang dengan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk mendapatkan kebutuhan dasarnya tersebut dengan tujuan kelangsungan hidupnya. Dengan demikian, seseorang dikatakan miskin absolut apabila pendapatan yang diperolehnya kurang dari garis kemiskinan dan tidak mampu mencukupi kebutuhan pokoknya. Menurut BPS, nilai nominal garis kemiskinan DIY tercatat sebesar Rp 354.000 per kapita per bulan di Bulan Maret 2016.

- b. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif dilihat dari aspek ketimpangan sosial. Apabila seseorang sudah mampu memenuhi kebutuhan dasar

minimumnya, namun masih jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan masyarakat di sekitarnya, maka orang tersebut termasuk kategori miskin relatif. Semakin tinggi kesenjangan tingkat pendapatan antara golongan atas dengan golongan bawah maka akan semakin tinggi pula jumlah penduduk miskin. Dengan demikian, kemiskinan relatif berhubungan erat dengan distribusi pendapatan. Sastraatmadja (2007) menyebutkan bahwa kemiskinan dapat dibedakan menjadi empat, yaitu:

- 1) *Persistent proverty*, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun
- 2) *Cyclical poverty*, yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan
- 3) *Seasonal poverty*, yaitu kemiskinan musiman yang sering ditemui pada kasus nelayan dan pertanian.
- 4) *Accident poverty*, yaitu kemiskinan yang tercipta karena adanya bencana alam, konflik dan kekerasan atau akibat dari suatu kebijakan yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat.

8. Penyebab Kemiskinan

BPS menyebutkan bahwa berdasarkan penyebabnya, kemiskinan terbagi menjadi 2 yaitu:

- a. Kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang disebabkan karena faktor-faktor adat atau budaya dari suatu daerah yang menyebabkan seseorang tetap berada dalam kemiskinannya.
- b. Kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang disebabkan karena ketidakberdayaan seseorang pada tatanan sosial yang kurang adil

 Todaro dan Smith (2008) menyebutkan bahwa kemiskinan yang disebabkan karena interaksi dari faktor-faktor berikut ini:

- a. Tingkat pendapatan nasional negara terbilang rendah dan laju pertumbuhan ekonominya berjalan lambat.
- b. Pendapatan perkapita rendah dan pertumbuhannya sangat lambat atau bahkan stagnasi.
- c. Terjadi ketimpangan distribusi pendapatan.
- d. Mayoritas penduduk hidup di bawah tekanan kemiskinan absolut.
- e. Fasilitas dan pelayanan kesehatan buruk dan sangat terbatas, kekurangan gizi.
- f. Fasilitas pendidikan dan kurikulum kurang memadai.

 Suroso (2006) menyebutkan kemiskinan yang terjadi di negara miskin disebabkan oleh faktor-faktor berikut:

- a. Kemiskinan alami, yaitu kemiskinan yang disebabkan karena keadaan alam suatu wilayah atau negara yang tidak subur dan

tidak mempunyai sumber daya alam potensial. Namun, faktor ini mendapat kritikan.

- b. Kemiskinan karena penjajahan. Negara yang mengalami penjajahan dalam waktu yang lama akan menjadi miskin karenadiperas oleh penjajah. Namun, faktor ini juga mendapat kntikan.
- c. Kemiskinan karena tradisi sosio-kultural. Kemiskinan ini turun temurun dari nenek moyang karena sultnya merubah kebiasaan penduduk. Misalnya suku-suku di pedalaman.
- d. Kemiskinan karena lokasi yang terisolasi. Kemiskinan daerah yang disebabkan karena daerah tersebut jauh dari perkotaan dan sulitnya jalur transportasi.
- e. Kemiskinan struktural. Kemiskinan yang disebabkan karena adanya perbedaan antara kota dengan desa dan adanya persaingan yang tidak seimbang antara daerah yang mempunyai keunggulan komparatif dengan daerah yang tidak memiliki keunggulan komparatif.

Selain faktor-faktor di atas, kemiskinan pada suatu negara, juga disebabkan karena:

- a. Mata pencaharian utama penduduk adalah pertanian Negara yang mata pencaharian utama penduduknya pertanian akan miskin. Hal ini tersebut menyebabkan negara disebabkan produktivitas pertanian lebih rendah daripadam sektor industry

dan jasa, apalagi pertanian yang dilakukan penduduk masih bersifat tradisional dengan waktu lama dan harga jual yang kurang layak, menyebabkan rendahnya pendapatan dari sektor pertanian.

- b. Ekonomi dualitas merupakan perekonomian yang berpusat pada dua pihak. Pihak pertama berpusat pada perekonomian pasar dan lainnya berekonomi pertanian. Ekonomi pasar mempunyai ciri modern, sedangkan ekonomi pertanian terbelakang. Kondisi ini menyebabkan ketimpangan pendapatan pada penduduk kota dan desa.
- c. Sumber alam yang kurang terolah menyebabkan negara tidak mampu berkembang untuk mencari sumber daya alam yang baru.
- d. Pengangguran dan pengangguran tersembunyi seperti pengangguran yang berpendidikan muncul karena mereka tidak mampu memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan pendidikannya.
- e. Ketiadaan inisiatif dan usaha
- f. Tidak adanya inisiatif dan usaha dari masyarakat untuk melakukan inovasi dalam pekerjaannya menjadikan masyarakat di wilayah tersebut tidak bisa berkembang dan mampumeningkatkan pendapatannya.

- g. Kelangkaan modal Negara terbelakang mempunyai modal dan tabungan yang sangat kecil. Investasi bruto hanya sekitar 5-6% dari pendapatan nasional bruto, sedangkan negara industry mencapai kira-kira 15-20%.
- h. keterbelakangan teknologi termin dalam ongkos produksi yang tinggi, upah buruh rendah, besarnya jumlah tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih dan mahalnnya barang-barang modal yang dipergunakan untuk memproduksi suatu produk.

9. Ukuran Kemiskinan

BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar sebagai indikator kemiskinan, yaitu

- a. *Head count index*, yaitu persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan
- b. *Poverty gap index*, yaitu ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.
- c. *Poverty severity index*, yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.

Ukuran kemiskinan adalah berbagai metode dan indikator yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur tingkat kemiskinan dalam populasi. Berikut adalah beberapa ukuran kemiskinan yang sering digunakan dalam penelitian dan kebijakan publik:

- a. Garis Kemiskinan (Poverty Line): Garis kemiskinan adalah ambang batas pendapatan atau konsumsi di bawah mana seseorang atau rumah tangga dianggap miskin. Garis kemiskinan bisa bersifat absolut (mengukur kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal) atau relatif (dibandingkan dengan standar hidup rata-rata di suatu negara).
- b. Kemiskinan Ekstrem: Biasanya didefinisikan sebagai hidup dengan kurang dari \$1.90 per hari (garis kemiskinan internasional yang ditetapkan oleh Bank Dunia).
- c. Poverty Gap Index (PGI): Indeks ini mengukur rata-rata kesenjangan pendapatan dari garis kemiskinan, memberi gambaran seberapa jauh orang miskin berada di bawah garis kemiskinan dan seberapa parah kemiskinan tersebut.
- d. Indikator Keterasingan Sosial: Mengukur kemiskinan berdasarkan akses terhadap hak-hak dasar dan partisipasi sosial. Orang miskin sering kali terpinggirkan dari masyarakat, tidak hanya dari segi ekonomi tetapi juga dalam hal pendidikan, kesehatan, dan partisipasi sosial.

10. Teori Kemiskinan

a. Teori Neo-Liberal

Teori ini dikemukakan oleh Shanon, Spicker, Cheyne, O'Brien dan Belgrave. Teori ini berpendapat bahwa kemiskinan merupakan permasalahan individu yang muncul karena

kelemahan dan pilihan individu yang bersangkutan. Kemiskinan akan hilang dengan sendirinya apabila kekuatan pasar dibuka lebar dan pertumbuhan ekonomi ditingkatkan setinggi-tingginya. Menurut teori ini, penanggulangan kemiskinan bersifat residual, yang melibatkan keluarga, kelompok swadaya atau lembaga keagamaan, sedangkan negara akan bertindak setelah lembaga lembaga di atas tidak mampu menanggulangi kemiskinan. Contoh penerapan teori ini adalah program Jaminan Pengaman Sosial (JPS)

b. Teori Sosial Demokrat

Menurut teori ini, kemiskinan bukan permasalahan individual melainkan permasalahan struktural. Kemiskinan disebabkan adanya ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakat yang disebabkan oleh tersumbatnya akses masyarakat terhadap sumber-sumber modal. Teori ini menekankan pentingnya manajemen dan pendanaan dari negara dalam memberikan pelayanan sosial dasar bagi seluruh masyarakat. Menurut teori ini, strategi penanggulangan kemiskinan harus bersifat institusional melalui program-program jaminan sosial dan bantuan sosial.

c. Teori Marjinal

Teori ini mengasumsikan bahwa kemiskinan di perkotaan disebabkan adanya kebudayaan kemiskinan yang tersosialisasi

di masyarakat. Teori ini menyebutkan bahwa masyarakat miskin karena adanya budaya kemiskinan dengan karakter apatis, menyerah pada nasib, sistem keluarga yang tidak mantap, pendidikan yang kurang, kurang ambisi untuk membangun masa depan, kejahatan dan kekerasan yang banyak terjadi.

d. Teori Pembangunan

Teori ini menyebutkan bahwa akar permasalahan Kemiskinan adalah persoalan perekonomian dan masyarakat sebagai satu kesatuan. Asumsi dari teori ini adalah:

- 1) Negara menjadi miskin karena ketiadaan atribut industrialisasi, modal, kemampuan manajerial, dan prasarana yang diperlukan untuk peningkatan ekonomi.
- 2) Pertumbuhan ekonomi adalah kriteria utama pembangunan yang dianggap dapat mengatasi masalah-masalah ketimpangan.
- 3) Kemiskinan akan hilang dengan sendirinya bila pasar diperluas sebesar-besarnya dan pertumbuhan ekonomi didorong setinggi-tingginya.

Berdasarkan ketiga asumsi di atas, dapat disimpulkan bahwa persoalan ekonomi dan merupakan kemiskinan pembangunan, bukan hanya persoalan budaya.

e. Teori Siklus Kemiskinan

- 1) Gunnar Myrdal: Mengemukakan bahwa kemiskinan adalah siklus yang terus berulang, di mana faktor-faktor seperti pendidikan yang rendah, kesehatan yang buruk, dan kurangnya akses ke sumber daya ekonomi menyebabkan generasi berikutnya tetap miskin.
- 2) William Ryan: Memperkenalkan konsep "blaming the victim" yang menekankan bahwa seringkali masyarakat menyalahkan individu yang miskin tanpa melihat faktor struktural yang mendasari kemiskinan.

f. Teori Ketergantungan (Dependencia)

- 1) Andre Gunder Frank: Menyatakan bahwa kemiskinan di negara-negara berkembang disebabkan oleh hubungan yang tidak setara dengan negara-negara maju, di mana negara-negara berkembang dieksploitasi secara ekonomi.

B. Penelitian Terdahulu

1. Debby ch. Rotinsulu, avriano r. Tenda, luciana m. Leonufina 2016, analisis dampak anggaran pendapatan dan belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan pengangguran di sulawesi utara, dimana dalam penelitian peneliti melakukan analisis Pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan serta pengangguran tentunya tidak lepas dari peran serta pemerintah sebagai pengambil kebijakan serta kuasa penggunaan anggaran untuk dapat merangsang perekonomian menuju ke arah yang lebih baik melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tentunya diharapkan akan mempercepat roda perekonomian. Dengan adanya perputaran cepat roda perekonomian diharapkan akan membuka peluang ekonomi baru yang tentunya akan menarik tenaga kerja yang berdampak pada angka penurunan pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dan tidak lagi terpuruk pada jurang kemiskinan. Untuk itu dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa pengaruh pemerintah melalui APBD nya dalam meningkatkan pertumbuhan, menekan angka pengangguran dan mengurangi kemiskinan di Kabupaten, Kota di wilayah Sulawesi Utara

2. Mc. Khuzaironi 2015, Pengaruh Kebijakan APBD Dan Kemiskinan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Jawa Tengah, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kapasitas fiskal, alokasi belanja modal, pembiayaan daerah dan kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap variabel kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan merupakan variabel yang berpengaruh paling besar terhadap variabel kesejahteraan masyarakat. Selama 5 tahun pelaksanaan desentralisasi fiskal di Provinsi Jawa Tengah secara empirik dapat dibuktikan bahwa kesejahteraan masyarakat dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah meningkat tiap tahunnya.
3. Dewi Irma Septiyani Paulus, Rosalina A.M. Koleangan, Daisy S.M. Engka 2017, Analisis Pengaruh PAD, DAU Dan DAK Terhadap

Kemiskinan Melalui Belanja Daerah Di Kota Bitung. Penelitian ini dibuat untuk mengetahui sejauh mana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap kemiskinan melalui Belanja Daerah di Kota Bitung. Berdasarkan data time series tahun 2005-2015 dan diolah berdasarkan metode analisa regresi berganda untuk pengujian analisis jalur yang digunakan dapat diketahui bahwa hubungan antara PAD, DAU, DAK terhadap kemiskinan melalui Belanja Daerah adalah hubungan negatif. Dimana penurunan 1 persen kemiskinan adalah kontribusi dari PAD 0.6216 persen, DAU 4,7930 persen dan DAK 0.2101 persen melalui Belanja Daerah Kota Bitung. Sedangkan secara keseluruhan diketahui bahwa jika terjadi kenaikan 1 persen pada Belanja Daerah maka akan terjadi penurunan angka kemiskinan sekitar 0.1856 persen.

4. Sinurat Riki Kurniawati, 2019, Penelitian ini di buat untuk mengetahui sejauh mana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap kemiskinan melalui Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Medan. Berdasarkan time series tahun 2010-2016 dan diolah berdasarkan metode analisa regresi berganda untuk menguji analisis jalur yang digunakan dapat diketahui bahwa hubungan antara PAD, DAU, dan DAK terhadap kemiskinan melalui Belanja Daerah adalah secara parsial DAU mempengaruhi kemiskinan dengan signifikan 0,013 serta terhitung

2,770>t tabel 2,109, PAD secara parsial mempengaruhi Belanja Daerah dengan signifikan 0,000 serta thitung 6,768>t tabel 2,109 dan secara simultan PAD, DAU, dan DAK mempengaruhi kemiskinan dengan signifikan 0,014 serta thitung 4,784>t tabel 2,109.

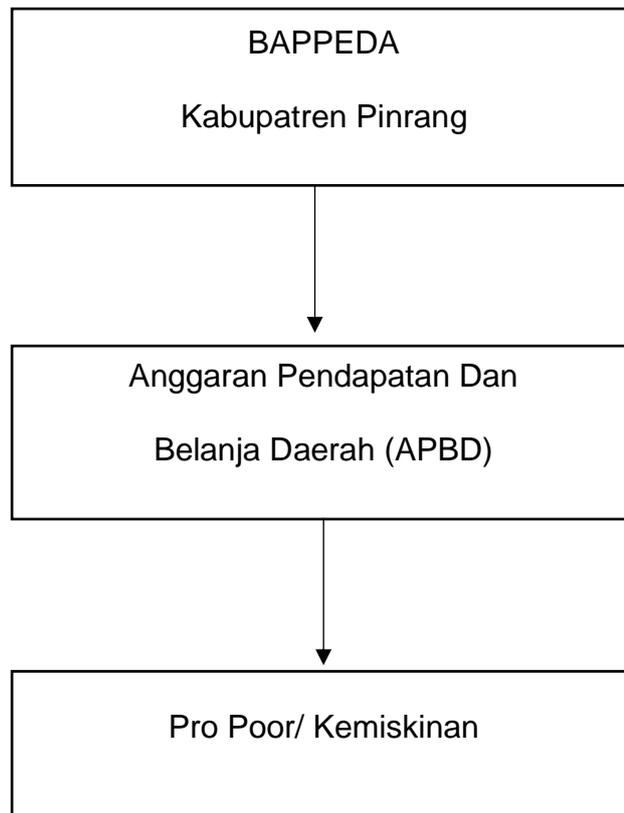
5. Della, Juliani (2019) Pengaruh Dana Transfer dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap pengentasan kemiskinan di 19 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat tahun 2010-2017. Data yang dianalisis berbentuk data panel yaitu data yang merupakan gabungan dari data time-series dan cross-section, metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi Fixed Effect. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah persentase penduduk miskin sedangkan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Pendapatan Asli Daerah. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengentasan kemiskinan, sedangkan Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan di 19 Kabupaten/kota di Sumatera Barat.

Kata Kunci Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Pendapatan Asli Daerah dan pengentasan kemiskinan.

6. "The Great Escape: Health, Wealth, and the Origins of Inequality" oleh Angus Deaton (2013): Deaton menganalisis hubungan antara kesehatan, kemakmuran, dan ketidaksetaraan, serta bagaimana kemajuan di bidang kesehatan dan ekonomi telah mengurangi kemiskinan global meskipun ketidaksetaraan masih tinggi. Meskipun ada kemajuan yang signifikan dalam mengurangi kemiskinan global, Deaton menekankan bahwa manfaat dari kemajuan ini tidak didistribusikan secara merata. Ketidaksetaraan baik dalam pendapatan maupun kesehatan masih sangat tinggi. Negara-negara yang lebih maju telah menikmati lebih banyak keuntungan dibandingkan negara-negara berkembang. Deaton menggunakan berbagai data empiris untuk mendukung argumennya. Dia menganalisis tren jangka panjang dalam kesehatan dan ekonomi, serta menggunakan studi kasus untuk menunjukkan bagaimana negara-negara tertentu telah berhasil atau gagal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat mereka. • Temuan dan argumen Deaton telah mempengaruhi diskusi tentang kebijakan publik, khususnya mengenai efektivitas bantuan luar negeri dan pentingnya investasi dalam institusi lokal.

C. Kerangka Pikir

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



Berdasarkan gambar 2.1 diatas menjelaskan bahwa dana pro poor/Kemiskinan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan dianalisis seperti apa kebijakan yang terdapat didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam meminimalisir peningkatan prop poorangka kemiskinan yang terjadi pada wilayah Kabupaten Pinrang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti akan melaksanakan penelitian di BAPPEDA yang mengelola APBD di Kabupaten Pinrang dan akan dilaksanakan selama bulan Mei 2024 – Juli 2024

B. Informan Penelitian

Menurut pendapat Sugiyono (2017), Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, maka peneliti sangat erat kaitannya dengan faktor faktor kontekstual, jadi dalam hal ini sampling dijamin sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber. Maksud kedua dari informan adalah untuk mengali informasi yang menjadi dasar dan rancangan teori yang dibangun Adapun kriteria dan informan yang ditunjuk atau dipilih dalam penelitian ini adalah informan yang mengelola anggaran responsive gender. Kriteria-kriteria informan responden dalam penelitian ini yaitu:

1. Kepala Dinas pada OPD yang ada di Kabupaten Pinrang.
2. Staf OPD yang dalam hal ini pengelola APBD pada di Kabupaten Pinrang.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi lisan yang dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur oleh dua orang atau lebih, baik secara langsung maupun jarak jauh, untuk membahas dan menggali informasi tertentu guna mencapai tujuan tertentu pula. Wawancara ini dengan staf BA

PPEDA pengelola APBD Di Kabupaten Pinrang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Dokumentasi dalam hal ini yaitu APBD di Kabupaten Pinrang

D. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis Data

- a. Data Primer Data yang diperoleh langsung dari objek penelitian sumber data penelitian ini diperoleh dari data yakni data APBD di Kabupaten Pinrang.
- b. Data Sekunder Data yang diperoleh dengan membaca buku, majalah, hasil penelitian yang sudah ada atau literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2. Sumber Data

a. *Paper*

Adapun sumber data dalam penelitian adalah staf Bappeda yang dalam hal ini pengelola APBD di Kabupaten Pinrang.

b. *Place*

Adapun tambahan penulisan dalam penelitian ini seperti buku dan jurnal serta data sebagai alat penunjangnya.

c. *Person*

Tempat penelitian pengelola APBD di Kabupaten Pinrang

E. Teknik Analisis Data

1. Deskriptif Kualitatif

Menurut Sugiyono, (2017), analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar. Definisi tersebut memberikan gambaran tentang betapa pentingnya kedudukan analisis data dilihat dari segi

tujuan penelitian. Prinsip pokok penelitian kualitatif adalah menemukan teori dari data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah yaitu:

a) Pengumpulan Data (Data Collection)

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara dan studi dokumentasi.

b) Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, menelusuri tema, gugus-gugus, menulis memo dan sebagainya membuat dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan.

c) Display Data

Display data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian naratif. data kualitatif disajikan dalam bentuk teks Penyajiannya juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel dan bagan.

d) Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (Conclusion Drawing and Verification)

Merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan. Antara display data dan penarikan kesimpulan terdapat aktivitas analisis data yang ada. Dalam pengertian ini analisis data kualitatif merupakan upaya berlanjut, berulang dan terus-menerus.

Masalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang terkait. Selanjutnya data yang telah dianalisis, dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk mendeskripsikan fakta yang ada di lapangan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian diambil intisarinnya saja. Berdasarkan keterangan di atas, maka setiap tahap dalam proses tersebut dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber yang telah didapat dari lapangan dan foto pribadi, dokumen resmi, gambar, dokumen sebagainya melalui metode wawancara yang didukung dengan studi dokumentasi.

2. Rasio Efektivitas

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi anggaran pengentasan kemiskinan}}{\text{Target anggaran pengentasan kemiskinan}} \times 100$$

Mahmudi (2010:143) dapat dikategorikan tingkat efektivitasnya sebagai berikut:

Tabel 2.1
Standar Efektivitas Kinerja Pemerintah

Presentase Kinerja Pemerintah	Kriteria
60	Tidak efektif
60%-80%	Kurang efektif
80%-90%	Cukup efektif
90%-100%	Efektif
100%	Sangat efektif

Sumber: Mahmudi (2010)

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah

1. Sejarah Kabupaten Pinrang

Kabupaten Pinrang adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis Kabupaten Pinrang terletak antara 43 10'30', 30 19'30' lintang utara dan 119 26'30'-119 47'20' bujur timur. Luas wilayah Kabupaten Pinrang adalah 1.961,77 km² atau 3,15 % dari luar wilayah Sulawesi Selatan terdiri dari 12 kecamatan 39 kelurahan dan 65 desa. Dengan batas wilayah administratif. Lintang Utara d26 30-119o47 20 Bujur Timur. Batas batas wilayah Kabupaten Pinrang adalah sebagai berikut : Sebelah Utara :berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kota Pare-Pare. Sebelah Barat :berbatasan dengan Kabupaten Polaweli Mamasa dan Selat Makassar. Sebelah Timur :Kabupaten Enrekang dan kabupaten Sidrap. Ada beberapa versi mengenai asal muasal pemberian nama Pinrang yang berkembang di masyarakat Pinrang sendiri. Versi yang pertama menyebut bahwa 49 Pinrang berasal dari bahasa Bugis yaitu kata "benrang" yang berarti "air genangan" bisa juga berarti "rawa-rawa". Hal ini disebabkan oleh karena pada awal pembukaan daerah Pinrang yang tepatnya saat ini di pusat kota Kabupaten Pinrang masih berupa daerah rendah yang sering tergenang dan berawa.

Versi kedua menyebutkan bahwa hal ini disebabkan oleh karena suatu ketika Raja Sawitto yang bernama La Dorommeng La Paleteange, bebas dari pengasingan dari kerajaan Gowa berkat bantuan Basos Panca Arung Enrekang dan dibantu Para Pasukan Pemberaninya dari Kampung Kaluppini Enrekang. Kedatangan tersebut disambut gembira oleh rakyatnya, namun mereka terheran-heran karena wajah sang raja berubah dan mereka berkata "Pinra bawangngi tappana puatta pole Gowa", yang artinya berubah saja mukanya Tuan Kita dari Gowa. Maka setelah itu rakyat mulai menyebut daerah tersebut sebagai Pinra yang artinya berubah, dikemudian hari masyarakat setempat mengubah penyebutan tersebut menjadi Pinrang. Sumber lain ini mengatakan pemukiman kota Pinrang yang dahulunya rawa-rawa yang selalu tergenang air membuat masyarakat senantiasa berpindah-pindah mencari wilayah pemukiman yang bebas genangan air, berpindah-pindah atau berubah-ubah pemukiman dalam bahasa Bugis disebut "pinra-pinra onroang". Setelah 50 masyarakat menemukan tempat pemukiman yang baik, maka tempat tersebut diberi nama: PINRA-PINRA. Dari kedua sejarah yang berbeda itu lahirlah istilah yang sama, yaitu "PINRA", kemudian kata itu dalam perkembangannya dipengaruhi oleh intonasi dan dialek bahasa Bugis sehingga menjadi Pinrang yang sekarang ini diabadikan menjadi nama dari Kabupaten Pinrang.

2. Masa Penjajahan

Cikal bakal Kabupaten Pinrang berasal dari Onder Afdeling Pinrang yang berada di bawah afdeling Pare-Pare, yang merupakan gabungan empat kerajaan yang kemudian menjadi self bestuur atau swapraja, yaitu Kassa, Batulappa, Sawitto Dan Suppa yang sebelumnya adalah anggota konfederasi kerajaan Massenrengpulu (Kassa dan Batulappa) dan Ajatappareng (Suppa dan Sawitto). Hal ini merupakan bagian dari adu domba kolonial untuk memecah persatuan di Sulawesi Selatan. Pemilihan nama Pinrang sebagai nama wilayah dikarenakan daerah Pinrang merupakan tempat berkumpulnya keempat raja tadi dan sekaligus tempat berdirinya kantor onder afdelingeen (kantor residen). Selanjutnya Onder Afdeling Pinrang pada zaman pendudukan Jepang menjadi Bunken Kanrikan Pinrang dan pada zaman kemerdekaan akhirnya menjadi Kabupaten Pinrang. 51 Sebagaimana diketahui bahwa ketika Jepang masuk di Pinrang sekitar tahun 1943, sistem pemerintahan warisan kolonial dengan struktur lengkap yang terdiri dari 4 (empat) swapraja, masing-masing Swapraja Sawitto, Swapraja Batu Lappa, Swapraja Kassa dan Swapraja Suppa. Ketika Pinrang menjadi Onder Afdeling di bawah afdeling Parepare, sementara afdeling Parepare adalah salah satu dari tujuh afdeling yang ada di provinsi Sulawesi Selatan.

3. Masa Kemerdekaan

Dengan ditetapkannya PP Nomor 34 Tahun 1952 tentang Perubahan Daerah Sulawesi Selatan, pembagian wilayahnya menjadi daerah swatantra. Pertimbangan diundangkannya PP tersebut adalah untuk memenuhi keinginan rakyat dan untuk memperbaiki susunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Daerah swatantra yang dibentuk adalah sama dengan wilayah afdeling yang ditetapkan dalam keputusan Gubernur Timur besar (GROTE GOSTE) tanggal 24 Juni 1940 Nomor 21, kemudian diubah oleh Keputusan Gubernur Sulawesi Nomor 618 Tahun 1951. Perubahan adalah kata afdeling menjadi daerah swatantra dan Onder Afdeling menjadi kewedanaan. Dengan perubahan tersebut maka Onder Afdeling Pinrang berubah menjadi kewedanaan Pinrang yang membawahi empat swapraja dan beberapa distrik. Dengan status demikian inilah 52 pemerintahan senantiasa mengalami pasang surut di tengah-tengah pasang surutnya keadaan pemerintahan. Upaya memperbaiki struktur dan penyelenggaraan pemerintahan di satu sisi, di samping memenuhi kebahagiaan dan keinginan rakyat. Maka, pada tahun 1959 keluarlah Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 yang berlaku pada tanggal 4 Juli 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi yang praktis, termasuk membentuk Daerah Tingkat II Pinrang. Pada tanggal 28 Januari 1960, keluar surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: UP-7/3/5-392 yang menunjuk H.A. MAKKOELAOE menjadi Kepala Daerah Kabupaten Pinrang, karena

pada saat itu unsur atau organ sebagai perangkat daerah otonomi telah terpenuhi. Hal ini kemudian dikaji melalui suatu simposium yang dilakukan oleh kelompok pemuda, khususnya KPMP Kabupaten Pinrang dan diteruskan kepada DPRD untuk dituangkan ke dalam suatu PERDA tersendiri.

4. Topografi

Kondisi topografi di wilayah Kabupaten Pinrang bervariasi dari kondisi datar hingga curam, yang meliputi tiga dimensi kewilayahan, dataran rendah, laut dan dataran tinggi. Kecamatan Patampanua, Watang Sawitto dan Tiroang, topografinya sebagian besar terdiri dari tanah datar. Kecamatan yang memiliki pantai masing-masing, 53 Kecamatan Suppa, Mattiro Sompe, Lanrisang dan Cempa dengan garis pantai sepanjang 93 Km, sedangkan kecamatan yang mempunyai topografi berbukit dan bergunung adalah kecamatan Lembang, Duampanua dan Batulappe. Ketinggian wilayah 0-500 m di atas permukaan laut (60,41 %), ketinggian 500-1000 m di atas permukaan laut (19,69%) dan ketinggian 1000 m di atas permukaan (9,90%). Berdasarkan struktur perekonomiannya.

Kabupaten Pinrang merupakan daerah agraris dengan berbagai potensi pertanian yang dimiliki, dengan rincian sebagai berikut

- a. Areal pemukiman 508,2 Ha-2,58%
- b. Areal sawah 50.459,2 Ha-25,72%
- c. Areal perkebunan 9.346,4 Ha-4,76%

- d. Areal lahan kosong 16.178,5 Ha-8,25%
- e. Areal semak belukar 42.380,4 Ha-21,6%
- f. Areal ladang/tegalan 15.929,8 Ha-8,12%
- g. Areal perkebunan 8.387,1 Ha-4,26 %
- h. Areal hutan 30.399,7 Ha-15,5 %
- i. Areal tambak 15.528,7 Ha-7,92 %
- j. Areal mangrove 59,7 Ha-0,03 %
- k. Areal sungai 2.132,9 Ha-1,09 %
- l. Lain-lain 315,5 Ha-0,16 %

B. Profil BAPPEDA Kabupaten Pinrang

1. Tugas Dan Fungsi

Peraturan bupati pinrang nomor 41 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja badan perencanaan pembangunan daerah menetapkan peraturan bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja badan perencanaan pembangunan daerah. Berikut ini tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pinrang.

a. Tugas pokok

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Bupati kepadanya.

b. Fungsi

- 1) perumusan kebijakan
urusan pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan;
- 2) pelaksanaan kebijakan
urusan pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan;
- 3) pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan
urusan pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan;
- 4) pelaksanaan administrasi Badan; dan
- 5) penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Struktur Organisasi Bappeda

Sesuai dengan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati No. 41 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Pinrang, maka Struktur organisasi perangkat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas :

- a. Kepala Badan;

b. Sekretariat Badan terdiri atas:

- 1) Sub bagian Program;
- 2) Sub bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum; dan
- 3) Sub bagian Keuangan.

c. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayahterdiri atas:

- 1) Subbidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
- 2) Subbidang Perumahan, Permukiman dan Perhubungan; dan
- 3) Subbidang Komunikasi dan Informasi, Statistik, Persandian dan Kecamatan.

d. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alamterdiri atas:

- 1) Subbidang Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi;
- 2) Subbidang Keuangan, Penanaman Modal dan Pariwisata; dan
- 3) Subbidang Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral.

e. Bidang Sosial Budaya terdiri atas:

- 1) Subbidang Sosial, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
- 2) Subbidang Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah; dan

3) Subbidang Pendidikan, Pemuda Olahraga, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

f. Bidang Penelitian dan Pengembangan terdistribusi:

1) Subbidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.

2) Subbidang Sosial, Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan;
dan

3) Subbidang Inovasi dan Teknologi.

g. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan

h. Kelompok Jabatan fungsional

D. Analisis Dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Adapun hasil penelitian berupa data kualitatif dan kuantitatif yang diperoleh dari Dinas BAPPEDA Kabupaten Pinrang selaku instansi yang menangani pengentasan kemiskinan.

a. Anggaran Kemiskinan

Adapun anggaran kemiskinan pada tahun 2021-2023 di Dinas BAPPEDA Kabupaten Pinrang adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Anggaran Kemiskinan Tahun 2017-2021

PROGRAM	TAHUN	ANGGARAN (Rp)
BANTUAN SOSIAL	2017	650.000.000
	2018	500.000.000
	2019	3.125.000.000
	2020	329.700.000
	2021	2.138.000.000
TOTAL		6.742.000.000

Sumber: Data Diolah (2024)

Berdasarkan tabel Anggaran Kemiskinan menunjukkan bahwa pada tahun 2017 anggaran kemiskinan sebesar Rp.650.000.000 dan pada tahun 2018 anggaran kemiskinan sebesar Rp.500.000.000 serta pada tahun 2019 anggaran kemiskinan sebesar Rp. 3.125.000.000 pada tahun 2020 anggaran kemiskinan sebesar Rp. 329.700.000 pada tahun 2021 anggaran kemiskinan sebesar Rp. 2.138.000.000. Jadi anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pengentasan kemiskinan dari tahun 2017-2021 sebanyak Rp.6.742.000.000

b. Realisasi Anggaran Kemiskinan

Adapun Realisasi Anggaran Kemiskinan pada tahun 2017-2021 di Dinas BAPPEDA Kabupaten Pinrang adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2

Realisasi Anggaran Kemiskinan Tahun 2017-2021

PROGRAM	TAHUN	REALISASI ANGGARAN
		(Rp)
BANTUAN SOSIAL	2017	140.950.000
	2018	138.700.000
	2019	2.654.700.000
	2020	182.150.000
	2021	2.060.000.000
TOTAL		5.176.500.000

Sumber: data diolah (2024)

Berdasarkan tabel Realisasi Anggaran Kemiskinan menunjukkan bahwa pada tahun 2017 realisasi anggaran kemiskinan sebesar Rp.140.950.000 pada tahun 2018 anggaran kemiskinan sebesar Rp.138.700.000 pada tahun 2019 anggaran kemiskinan sebesar Rp. 2.654.700.000 pada tahun 2020 anggaran kemiskinan sebesar Rp.

182.150.000 serta pada tahun 2021 anggaran kemiskinan sebesar Rp. 2.060.000.000 Jadi realisasi anggaran untuk pengentasan kemiskinan dari tahun 2017-2021 sebesar Rp. 5.176.500.000

c. Rekapitulasi anggaran dan realisasi

Adapun rekapitulasi anggaran dan realisasi anggaran untuk pengentasan kemiskinan di kabupaten pinrang untuk anggaran menunjukkan bahwa dari tahun 2017-2021 anggaran kemiskinan sebesar Rp. 6.742.000.000 dan realisasi anggaran kemiskinan sebesar Rp. 5.176.500.000

d. Efektivitas Pengelolaan Anggaran Kemiskinan

Berangkat dari tujuan penelitian dalam menjawab rumusan masalah penelitian, maka analisis yang akan digunakan adalah efektivitas pengelolaan Anggaran Kemiskinan pada Dinas BAPPEDA Kabupaten Pinrang. Berdasarkan data yang telah diperoleh dari APBD Dinas BAPPEDA Kabupaten Pinrang, maka adapun perhitungan pengelolaan Anggaran Kemiskinan adalah sebagai berikut (Mahmudii, 2010):

$$\text{RASIO EFEKTIVITAS} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Kemiskinan}}{\text{Anggaran Kemiskinan}} \times 100\%$$

Untuk perhitungan efektivitas pengelolaan Anggaran Kemiskinan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 berdasarkan rumus tersebut sebagai berikut :

1) Efektifitas Pengelolaan Anggaran Kemiskinan Tahun 2017

$$\begin{aligned}\text{Rasio Efektifitas} &= \frac{\text{Rp.140.950.000}}{\text{Rp.650.000.000}} \times 100 \% \\ &= 21.68\%\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efektifitas pengelolaan dan penyaluran bansos Pada tahun 2017 sebesar 21.68 % dengan kategori tidak efektif.

2) Efektifitas Pengelolaan Anggaran Kemiskinan Tahun 2018

$$\begin{aligned}\text{Rasio Efektifitas} &= \frac{\text{Rp. 138.700.000}}{\text{Rp.500.700.000}} \times 100 \% \\ &= 27.74\%\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan efektifitas pengelolaan Anggaran Kemiskinan diatas bahwa Pada tahun 2018 sebesar 27.74% dengan kategori tidak efektif.

3) Efektivitas Pengelolaan Anggaran Kemiskinan Tahun 2019

$$\begin{aligned}\text{Rasio Efektifitas} &= \frac{\text{Rp. 2.654.700.000}}{\text{Rp.3.125.000.000}} \times 100 \\ &= 84.95\%\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan efektifitas pengelolaan dan penyaluran anggaran kemiskinan diatas bahwa Pada tahun 2019 sebesar 84.95% dengan kategori cukup efektif.

4) Efektivitas Pengelolaan Anggaran Kemiskinan Tahun 2020

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Rp. 182.150.000}}{\text{Rp.329.700.000}} \times 100$$

$$= 55.25\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan efektifitas pengelolaan dan penyaluran anggaran kemiskinan diatas bahwa Pada tahun 2020 sebesar 55.24% dengan kategori kurang efektif.

5) Efektivitas Pengelolaan Anggaran Kemiskinan Tahun 2021

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Rp. 2.060.000.000}}{\text{Rp. 2.138.000.000}} \times 100$$

$$= 96.35\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan efektifitas pengelolaan dan penyaluran anggaran kemiskinan diatas bahwa Pada tahun 2021 sebesar 96.35% dengan kategori efektif.

e. Tingkat Efektivitas Anggaran Kemiskinan Kabupaten Pinrang

Adapun tingkat efektivitas anggaran kemiskinan dan realisasi anggaran yang telah dihitung seabagi berikut:

Tabel 4.4

Tingkat Efektivitas Anggaran Kemiskinan Tahun 2021-2023

Tahun	Realisasi Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Tingkat Efektifitas (%)	Keterangan
2017	140.950.000	650.000.000	21.68	Tidak Efektif
2018	138.700.000	500.000.000	27.74	Tidak Efektif
2019	2.654.700.000	3.125.000.000	84.95	Cukup Efektif

2020	182.150.000	329.700.000	55.25	TidakEfektif
2021	2.060.000.000	2.138.000.000	96.95	efektif
Rata-Rata			57.314	Tidak Efektif

Sumber : Data Diolah (2024)

2. Pembahasan

a. Anggaran Kemiskinan

Anggaran kemiskinan pada tahun 2017-2021 fluktuasi tiap tahunnya. Pada tahun 2017 anggaran kemiskinan sebesar Rp.650.000.000 . Pada Tahun 2018 anggaran kemiskinan sebesar Rp. 5000.000.000 yang tentu berbeda pada tahun sebelumnya. Sementara pada tahun 2019 anggaran kemiskinan sebesar Rp.3.125.000.000 , pada tahun 2020 anggaran kemiskinan sebesar Rp. 329.700.000 , pada tahun 2021 anggaran kemiskinan sebesar Rp. 2.138.000.000 hal ini menunjukkan adanya kenaikan anggaran yang cukup tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Dari hasil analisis dan wawancara kepada beberapa staf menerangkan bahwa Hal ini disebabkan karena kenaikan pajak tiap tahunnya. Pajak yang dimaksud adalah pajak pertambahan nilai barang yang disalurkan dan harga barang yang meningkat karena bantuan yang diberikan kepada masyarakat berupa barang sehingga dapat meningkatkan jumlah anggaran yang digunakan.

b. Efektivitas Pengelolaan Anggaran Kemiskinan

Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata rasio efektivitas dari tahun 2017-2021 anggaran kemiskinan memiliki tingkat efektivitas sebesar 57.314 % dengan kategori tidak efektif. Pada tahun 2017 pengelolaan anggaran kemiskinan sebesar 21.68 % dengan kategori tidak efektif. Pada tahun 2018 pengelolaan anggaran kemiskinan sebesar 27.74 % dengan kategori tidak efektif. Pada tahun 2019 pengelolaan anggaran kemiskinan sebesar 84.95 % dengan kategori cukup efektif. Pada tahun 2020 pengelolaan anggaran kemiskinan sebesar 55,25 % dengan kategori tidak efektif. Pada tahun 2021 pengelolaan anggaran kemiskinan 96.95 % kategori efektif

Dari tahun ke tahun efektifitas pengelolaan dan penyaluran anggaran kemiskinan mengalami fluktuasi. Dengan ini pihak Dinas BAPPEDA Kabupaten Pinrang dalam mengelola dan menyalurkan anggaran kemiskinan kepada masyarakat belum mengalami kemajuan. dari hasil kelima tahun tersebut bahwa Dinas BAPPEDA Kabupaten Pinrang dalam pengelolaan dan penyaluran anggaran kemiskinan dikategorikan Tidak Efektif. Pada tahun 2017-2021 semua program Dinas BAPPEDA Kabupaten Pinrang telah dilaksanakan sepenuhnya. Ini menjadi salah satu penilaian bagi peneliti bahwa Dinas BAPPEDA Kabupaten Pinrang dalam mengelola dan menyalurakn Anggaran Kemiskinan kepada masyarakat sudah dapat dikategorikan Tidak Efektif.

Dari hasil wawancara dengan Staf Bidang Keuangan BAPPEDA Kabupaten Pinrang mengemukakan bahwa terjadinya fluktuasi anggaran kemiskinan di Kabupaten Pinrang dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain sebagai berikut:

1. Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah: Perubahan dalam kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, dapat mempengaruhi alokasi anggaran untuk program-program pengentasan kemiskinan. Kebijakan fiskal, prioritas pembangunan, dan peraturan baru sering kali memengaruhi besaran anggaran yang dialokasikan. Selain dari pada itu ada masyarakat yang mengaku miskin lantaran merasa cukup enak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah yang dibingkai dalam Program Keluarga Harapan (PKH), ini berpengaruh dengan penurunan angka kemiskinan.
2. Pendapatan Daerah: Fluktuasi dalam pendapatan asli daerah (PAD) dapat mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam menganggarkan dana untuk program kemiskinan. Jika PAD menurun, alokasi anggaran untuk program sosial mungkin juga akan berkurang.
3. Efektivitas Program dan Kebutuhan Aktual: Evaluasi terhadap efektivitas program-program sebelumnya dapat menyebabkan perubahan dalam alokasi anggaran. Jika program tertentu terbukti tidak efektif, anggaran bisa dialihkan ke program lain

- yang dianggap lebih efektif. Selain itu, perubahan dalam kebutuhan masyarakat juga mempengaruhi alokasi anggaran.
4. Dukungan dari Pemerintah Pusat: Besarnya dana transfer dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), juga berpengaruh terhadap anggaran kemiskinan. Fluktuasi dalam besaran transfer ini dapat menyebabkan perubahan dalam anggaran yang tersedia di tingkat kabupaten.
 5. Perubahan Sosial dan Ekonomi: Perubahan dalam kondisi sosial dan ekonomi, seperti tingkat pengangguran, inflasi, dan harga komoditas, dapat mempengaruhi jumlah orang yang membutuhkan bantuan dan besarnya anggaran yang diperlukan.
 6. Krisis Ekonomi dan Bencana Alam: Krisis ekonomi atau bencana alam dapat secara signifikan mempengaruhi anggaran kemiskinan. Misalnya, bencana alam dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur dan peningkatan jumlah orang yang membutuhkan bantuan, yang memerlukan penyesuaian anggaran.
 7. Kapasitas Administratif dan Manajerial: Kapasitas administrasi dan manajerial pemerintah daerah dalam mengelola anggaran dan program pengentasan kemiskinan juga mempengaruhi fluktuasi anggaran. Keterlambatan dalam pencairan dana, ketidakmampuan dalam merencanakan dan

mengimplementasikan program, serta korupsi bisa menjadi faktor yang mengurangi efektivitas anggaran yang dialokasikan.

8. Belum adanya sistem informasi terpadu mengenai laporan kinerja dan proses pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.
9. Keterbatasan dalam Pelaksanaan Program: Pembatasan mobilitas dan protokol kesehatan membuat distribusi bantuan sosial dan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan menjadi lebih sulit karena adanya covid-19 dan membutuhkan biaya tambahan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata rasio efektivitas dari tahun 2017-2021 anggaran kemiskinan memiliki tingkat efektivitas sebesar 57.314 % dengan kategori tidak efektif. Pada tahun 2017 pengelolaan anggaran kemiskinan sebesar 21.68 % dengan kategori tidak efektif. Pada tahun 2018 pengelolaan anggaran kemiskinan sebesar 27.74 % dengan kategori tidak efektif. Pada tahun 2019 pengelolaan anggaran kemiskinan sebesar 84.95 % dengan kategori cukup efektif. Pada tahun 2020 pengelolaan anggaran kemiskinan sebesar 55,25 % dengan kategori tidak efektif. Pada tahun 2021 pengelolaan anggaran kemiskinan 96.95 % kategori efektif

Dari tahun ke tahun efektifitas pengelolaan dan penyaluran anggaran kemiskinan mengalami fluktuasi. Dengan ini pihak Dinas BAPPEDA Kabupaten Pinrang dalam mengelola dan menyalurkan anggaran kemiskinan kepada masyarakat belum mengalami kemajuan. dari hasil ketiga tahun tersebut bahwa Dinas BAPPEDA Kabupaten Pinrang dalam pengelolaan dan penyaluran anggaran kemiskinan dikategorikan Tidak Efektif. Pada tahun 2017-2021 semua program Dinas BAPPEDA Kabupaten Pinrang telah dilaksanakan sepenuhnya. Ini menjadi salah satu penilaian bagi peneliti bahwa Dinas BAPPEDA

Kabupaten Pinrang dalam mengelola dan menyalurakan Anggaran Kemiskinan kepada masyarakat sudah dapat dikategorikan Tidak Efektif.

B. SARAN

Adapun saran-saran dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Pinrang perlu lebih akurasi dalam pengambilan data penduduk miskin agar dana pengentasan kemiskinan dalam anggaran daerah dapat teralokasikan dengan tepat sasaran dan merata kepada seluruh penduduk miskin Kabupaten Pinrang.
2. Dalam menyusun anggaran pengentasan kemiskinan, Pemerintah perlu mempertimbangkan kepentingan masyarakat selain dari pada itu Pemerintah harus meningkatkan keterbukaan atau ada proses sosialisasi kegiatan-kegiatan yang diprogramkan pemerintah. Kemudian pemerintah juga perlu kerja maksimal dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan tersebut agar anggaran kemiskinan dapat teralisasi dengan efektif.
3. Perlu kajian aspek sosial dalam memahami realitas penduduk miskin dan mengindari kepentingan politik dalam praktek penganggaran penduduk miskin.
4. Monitoring dan evaluasi yang aktif, menerapkan monitoring yang efektif untuk memastikan bahwa anggaran yang di alokasikan benar tercapai dan memberikan nilai tambah yang di harapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Debby ch. Rotinsulu, avriano r. Ten da, luciana m. Leonufina (2010) *Analisis Dampak Anggaran Pendapatan Dan Belanja Deran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan Dan Pengangguran Di Sulawesi Utara*. Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah. Vol. 18, No. 3 (2016)
- Dewi Irma Septiyani Paulus, Rosalina A.M. Koleangan, Daisy S.M.Engka (2017)*Analisis Pengaruh Pad, Dau Dan Dak Terhadap Kemiskinan Melalui Belanja Daerah Di Kota Bitung*.Jurnal Pembangunan Ekonomidan Keuangan Daerah. Vol. 18, No. 3 (2016)
- Della, Juliani (2019).*Pengaruh Dana Transfer dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengantasan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat*.Diploma. Universitas Andalas
- Garrison, Noreen, dan Brewer. (2007). *Akuntansi Manajerial*. Edisi 11.Diterjemahkan oleh Nuri Hinduan dan Edward Tanujaya.Salemba Empat. Jakarta
- Mc. Khuzaironi (2015).*Pengaruh Kebjaksanaan Apbd Dan Kemiskinan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Jawa Tengah*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Diponegoro: Semarang
- Suroso.(2006), *Kajian Kapasitas Sungai Logawa dalam Menampung Debit Banjir Menggunakan Program HEC-RAS*. Jurusan Teknik Si Universitas SoedirmanPurwokerto,.
- Sinurat, Riki Kurniawati, 2019, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (DAU), Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Kemiskinan Melalui Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Medan*. Skripsi. Universitas HKBP Nommensen.

Mardiasmo.(2009), *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
Jurnal Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan, dan Kemandirian Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (studi empiris pada pemerintah kabupaten/kota di pulau jawa periode 2006-2010).

Munandar, H., Kurniawan,F. Dan Santoso, P.(2007), *Mencari Hubungan antara Kebijakan Moneter dengan Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan.Kajian Menggunakan Data Regional Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.

Riskawati, dan Abdul.(2013), *Faktor Terjadinya Gelandangan dan Pengemis (Studi pada Gelandangan dan Pengemis Di Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung)*.<http://www.academia.edu/> diakses dan diunduh pada 15 September 2017.

<https://pinrangkab.bps.go.id/pressrelease/2023/12/20/31/profil-kemiskinan-kabupaten-pinrang-maret-2023.html>

Hasil pemeriksaan BPK-RI Pemkab Pinrang <https://pinrangkab.go.id/laporan-hasil-pemeriksaan-bpk-ri/>